

DAFTAR PUSTAKA

B U K U :

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1998, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan Jakarta.
- _____, 2002, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan ke-15, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat *Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Erwin Kallo, dkk, 2009, *Panduan Hukum Untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen dan Rusunami)*, Minerva Athena Pressindo, Bogor.
- Eddy Pranjoto, 2006, *Anatomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, CV. Utomo, Bandung.
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*, Laksbang Mediatama, Sleman.
- J.T.C. Simorangkir, dkk, 1993, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marhainis Abdulhay, 1984, *Hukum Perdata Material*, Pradya Paramita, Jakarta,
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muchsin,2007, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ramli Zein,1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

Riduan Syahrani,1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,Citra Aditya Bakti,Bandung.

Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian sengketa Hukum atas Tanah*, Bandung.

_____, 2003, *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penangan Kasus Tanah*, Seminar Nasional.

S.Chandra,2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta

Sarjita,2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.

Suhartiningsih, 2009, *Tanah terlantar (Asas dan Pembaharuan Konsep menuju Penerbitan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

_____,2006, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____,2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Victor M Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta

Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Yudhi Setiawan ,2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

ARTIKEL :

C. van Vollenhoven, 1975,*Orang Indonesia dan Tanahnya* (dalam bahasa Belanda ditulis Tahun 1919), Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri,Jakarta.

Fandri Entiman Nae, 2013, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat*, abstraksi.

Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, KITLV-Jakarta.

Mahfud MD, 2002, *Hasil Seminar Nasional Tentang "Reformasi Pertanahan"*, Mandar Maju, Yogyakarta.

Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Sertipikat Ganda Oleh BPN, <http://thesis-hukum.blogspot.com/2015/02/penyelesaian-sengketa-tanah-dan.html>, diakses 10 Juli 2015

Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I.

INTERNET :

Chekp4yz 's Blog, *Bab II Hukum Agraria*, <https://chekp4yz.wordpress.com/2010/07/28/bab-ii-agraria/>, diakses 6 Juli 2015

Dwika, *"Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum"*, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 12 Juni 2015.

Elkafilah, <https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/sejarah-hak-atas-tanah/>, diakses 4 Juli 2015

Forum Komunikasi Pertanahan, 2008, <http://erestajaya.blogspot.com/2008/11/bagaimana-sertifikat-tanah-ganda-dapat.html>, diakses 23 Juli 2015

Pondok Pesantren sirojul Munir, *Tanah Wakaf*, <http://badanwakafsirujulmunir.org/pengertian-wakaf/>, diakses 6 Juni 2015.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Agraria_1870, diakses 4 Juli 2015

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/Dr>, diakses 08.09.2015

PERATURAN :

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 *tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara*;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *tentang Pendaftaran Tanah*;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 *tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah*;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah*;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang *Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat*;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang *Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Tetentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya*;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997*;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 1 Tahun 1999 *tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 9 Tahun 1999 *tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu* .

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 *tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah*.

Yurisprudensi *Putusan Mahkamah Agung Nomor 350K/Sip/1968*, tanggal 3 Mei 1969.